# YOGYAKARTA

PERHELATAN PIALA DUNIA U-17

## Peluang Industri Pariwisata Gaet Wisatawan Manca

YOGYA (KR) - Perhelatan Piala Dunia U-17, 10 November-2 Desember 2023 secara tidak langsung menjadi peluang industri pariwisata di Indonesia, termasuk DIY untuk menarik pengunjung (wisatawan) mancanegara.

Diharapkan, Piala Dunia U-17 yang diikuti total 24 negara, dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke DIY. Lokasi perhelatan Piala Dunia U-17 terdekat yang ada di Solo dapat dimanfaatkan pelaku perhotelan dalam menawarkan akomodasi mereka kepada para pengunjung. Begitu pula dengan lama tinggal wisatawan maupun belanja diharapkan dapat terdongkrak dengan adanya event itu.

"Sebetulnya dampaknya event ini lebih berkaitan dengan mobilitas orang yang ke DIY, Solo dan sek-Harapannya itarnya. mereka bisa lama menginap di hotel, homestay atau yang lain. Kedua, dampaknya yang kita harapkan terkait spending money mereka saat belanja di DIY," kata Plh Kepala Dinas Pariwisata DIY Kurniawan di Yogyakarta, Selasa (13/11).

Menurut Kurniawan, sebelumnya pelaku industri pariwisata di Yogyakarta sudah berupaya menangkap peluang dari penyelenggaraan Piala Dunia U-17 di Indonesia, dengan menawarkan berbagai produk terutama akomodasi. Apalagi di sektor ekonomi kreatif yang disebut masih perlu dioptimalkan agar lebih dikenal luas ke mancanegara. Mengingat sub sektor ekraf banyak ya ada 17, tidak hanya fesyen, kuliner atau kriya tapi juga foto, game.

"Saya kira semua itu jadi potensi yang luar biasa. Misalnya dikaitkan dengan aktivitas utama di Piala Dunia yaitu sepakbola dijadikan momentum dengan tren sekarang,'

ungkapnya.

Lebih lanjut Kurniawan mengungkapkan, ukuran keberhasilan pariwisata sekarang sudah cenderung berubah dari yang semula kuantitas menuju kualitas. Beberapa faktor utamanya yakni diukur dengan lama tinggal wisatawan serta jumlah belanja wisata yang dikeluar- wisata dituntut bagai- sar itu bisa kita opti- apan kita dalam menyiapkan saat mereka berkunjung ke suatu wilayah. Oleh karena itu pengelola

mana bergeser dari kuantitas ke kualitas.

"Sebenarnya event be- tergantung juga dari kesi-

malkan sehingga dampak-

kan diri dan melakukan nya semakin besar dan promosi produk," ujarnya.



#### **PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**

PT. BPR Lumbungartha Muntilanindo akan melaksanakan lelang Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet dengan penawaran tertutup (closed bidding) atas objek lelang sebagai berikut :

GANDUNG HARMOKO, S.PT.

1 (satu) bidang tanah seluas 429 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdin diatasnya, sebagaimana tertuang dalam SHM No.03007 atas nama DWI WULANDARI terletak di Desa/Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman

Harga limit: Rp.636.800.000,-

Syarat dan ketentuan Lelang Pelaksanaan Lelang:

Tanggal Batas Akhir Penawaran

28 November 2023

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

11.00 Waktu Server aplikasi lelang melalui interne

Alamat Domain Tempat Lelang

www.lelang.go.id

Selasa

www.lelang.go.id Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Jl. Kusumanegara No.11, Yogyakarta

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup (Closed Bidding) melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat dor

Penawaran lelang dapat dilakukan sejak pengumuman ini terbit/ditayangkan sampai dengan Selasa, 28 November 2023 pukul 11.00 Waktu Server aplikasi lelang me internet sesuai WIB (batas akhir penawaran)

Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang ke nomor Virtual Account

(VA) masing-masing. disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah effektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% ditunjukan ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

Obyek Lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuens biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/ memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli. Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang KPKNL, Kanwil DJKN dan kantor

pusat DJKN. Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi PT. BPR Lumbungartha Muntilanindo, Jl. Pemuda Barat No.16 Muntilan Magelang, Telp (0293) 587302 dan KPKNL Yogyakarta, GKN Yogyakarta, Gedung B, Jalan

Kusumanegara No.11 Yogyakarta, Telp (0274) 544091 Magelang, 14 November 2023

PT. BPR Lumbungartha Muntilanindo



USULAN LANGKAH KONKRET

### Optimalkan Pengelolaan Sampah di Yogyakarta

YOGYA (KR) - Sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Fauzan ST mengusulkan supaya Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya meningkatkan dukungan terhadap program bank sampah tingkat RW. Ini melibatkan alokasi anggaran khusus, insentif bagi masyarakat, dan dorongan perusahaan untuk berpartisipasi.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta ini menilai, capaian positif bank sampah hingga 2023 perlu diapresiasi, namun perlu langkah lebih lanjut. "Pemerintah kota harus

memberikan dukungan finansial lebih besar, mendorong peran perusahaan dengan insentif pajak, dan intensifkan kampanye edukasi masyarakat,"

Selain itu dirinya juga mendorong pembentukan pusat pengolahan sampah modern yang ramah lingkungan dan berperan aktif dalam mengawasi transparansi program pengelolaan sampah. "Lakukan evaluasi berkala dan dorong inovasi melalui kompetisi untuk solusi yang lebih efektif,"

tandasnya. Muhammad Fauzan ST Fraksi PKS



Fauzan yang tergabung dalam anggota Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Gerakan Zero Sampah Anorganik meminta Pemkot untuk melibatkan pihak swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam tim pengawasan independen. Fasilitasi pertemuan rutin antara pemerintah, bank sampah, perusahaan, dan akademisi juga harus dilakukan.

Di samping itu hal yang tak kalah penting ialah melakukan evaluasi program, mendorong partisipasi semua stake-

holder dalam perumusan kebijakan, dan mensinergikan program pengelolaan sampah dengan inisiatif lingkungan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Kota Yogyakarta dapat mengatasi masalah sampahnya secara signifikan, menciptakan kota yang bersih, hijau, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

"Itu adalah usulan langkah konkret yakni dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah di Yogyakarta," tandasnya. (Dhi)-d



## **MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN** DPRD KOTA YOGYAKARTA

KOMISI D DPRD KOTA YOGYAKARTA

## Komitmen Kawal Seluruh Program Hajat Hidup Masyarakat

YOGYA (KR) - Komisi D menjadi alat kelengkapan dewan yang cukup strategis menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena ketugasannya yang menjadi mitra kerja eksekutif untuk bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Komisi D DPRD Kota Yogyakarta bahkan telah berkomitmen dalam mengawal seluruh program yang berkaitan dengan hajat hidup masya-

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Suryani, menjelaskan hajat hidup masyarakat yang dimaksud ialah meliputi seluruh fase kehidupan yakni sejak lahir hingga meninggaldunia. "Bahkan sejak masih dalam kandungan juga harus mendapatkan atensi. Begitu juga ketika sudah dilahirkan, tumbuh kembang anak, ketika menginjak remaja, dewasa, lansia sampai meninggaldunia harus mendapatkan hak-haknya. Pemenuhan hajat hidup ini jadi perhatian kami," tandasnya.

Seperti halnya dalam rapat pembahasan rencana kegiatan anggaran pada Senin (13/11) kemarin, Komisi D mengundang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan Dinas Kesehatan untuk melakukan pencermatan usulan kegiatan tahun depan. Hal sama juga dilakukan dengan mengundang OPD lain yang menjadi mitra kerja seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan lainnya.

Pembahasan bersama Dinas Kesehatan salah satu yang menjadi pengawasan ialah menyangkut kasus stunting atau berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Angka stunting di Kota Yogya sebenarnya sudah berada di bawah target nasional yakni 13 persen, sedangkan target nasional 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Akan tetapi harus terus diupayakan agar Kota Yogya bisa zero stunting. Sehingga sejak dalam kandungan, bayi harus mendapatkan perhatian agar kelak ketika dilahirkan dalam kondisi sehat.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi menuturkan sudah ada upaya yang cukup serius dari Dinas Kesehatan dalam menanggulangi angka stunting. Bahkan para remaja yang kelak akan menjadi calon ibu sudah dijamah dengan gerakan pemberian obat penambah darah. Remaja putri pada kondisi saat ini rentan mengalami



Ketua Komisi D memimpin rapat pembahasan bersama eksekutif.

anemia lantaran pola makan yang kurang sehat. Menjamurnya makanan cepat saji serta minuman tinggi gula yang semakin digemari kaum remaja, menjadi perhatian tersendiri. "Ada program rutin dari Dinas Kesehatan yang mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan obat penambah darah bagi pelajar putri. Jangan sampai mereka mengalami anemia karena juga bisa memicu kesehatan ketika kelak menjadi ibu,"

Begitu pula bagi pasangan pranikah maupun pasangan usia subur. Terdapat program baik berupa edukasi maupun pemberian asupan gizi seimbang. Antisipasi kasus stunting memang harus sudah dimulai sejak remaja

agar memiliki pemahaman yang memadai. Sehingga Komisi D mendorong agar posyandu remaja pada tahun depan bisa lebih diperhatikan. Selama ini kegiatan posyandu yang rutin bergulir ialah posyandu anak dan posyandu lansia. Sementara posyandu remaja terkesan vakum.

Kendati demikian, keberadaan posyandu kini mulai mendapat perhatian yang optimal. Pasalnya selain mendapatkan antropometri kit, kader posyandu juga sudah mulai diperhatikan melalui program fasilitasi. Setidaknya fasilitasi yang akan diberikan bagi 10 kader posyandu di tiap wilayah bisa pengganti uang transpor maupun bentuk apresiasi dari pemerintah. Dengan begitu maka kegiatan di dan mampu bergulir secara rutin. Di samping itu, perkembangan

posyandu bisa semakin semarak

anak tidak bisa disepelekan. Sebagai calon generasi penerus, anak merupakan aset yang paling berharga bagi bangsa. Beruntung Kota Yogya telah meraih predikat kota ramah anak serta Kota Layak Anak (KLA) untuk kategori utama. Hanya, saat ini masih harus bekeria keras agar mampu meraih kategori paripurna atau KLA yang sesungguhnya. Sehingga perlindungan anak tidak sekadar menjadi kegiatan di tingkat organisasi perangkat daerah melainkan benar-benar terimplementasi hing-

ga kelembagaan di masyarakat. Sejalan dengan itu, hak atas pendidikan tidak bisa disepelekan. Paling tidak, lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah harus mampu mengakomodir penduduk Kota Yogya. Oleh karena itu sistem penerimaan peserta didik baru sudah menjadi perhatian jajaran Komisi D agar memberikan peluang secara proporsional bagi warga kota. Namun bagi yang sekolah di lembaga swasta juga ada intervensi dari pemerintah supaya beban masyarakat atas biaya pendidikan tidak memberatkan.

Fahmi menambahkan, terkait hak mendapatkan pekerjaan,

Dinsosnakertrans diharapkan mampu memfasilitasi pelatihan kerja yang optimal. Terutama jenis pelatihan yang memang dibutuhkan oleh pemberi kerja, menjembatani pemagangan hingga proses perekrutan. Bantuan peralatan usaha juga harus selalu dialokasikan bagi penduduk lemah yang hendak berusaha mandiri. "Apa vang sudah dipaparkan untuk rencana kerja tahun depan oleh eksekutif, akan kami kawal betul agar benar-benar terealisasi dengan sasaran yang tepat," imbuhnya.

Begitu pula bagi penduduk yang meninggaldunia, khususnya dari keluarga ekonomi lemah yang masuk dalam keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) maupun data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Program santunan kematian yang saat ini diberikan senilai Rp 3 juta, kelak diupayakan bisa ditingkatkan minimal menjadi Rp 5 juta bagi setiap penduduk rentan yang meninggaldunia. Besaran itu bukan hanya untuk membantu proses bedah bumi saja melainkan juga kegiatan lainnya. Hanya, usulan itu masih harus melalui studi atau kajian terlebih dahulu dan paling cepat bisa diakomodir pada perubahan anggaran tahun depan.





KR-Ardhi Wahdan





KR-Ardhi Wahdan

Mitra kerja eksekutif mengikuti rapat pembahasan bersama Komisi D.